

## Analisis Kinerja Lembaga Penyelenggara Pelayanan Sosial dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar di Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

Nassa Yulinda Sari<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik,  
Universitas Hang Tuah

\*Corresponding author: sri.wahyuni@hangtuah.ac.id

### Abstract

*The Surabaya City Government through the Social Service, formed the UPTD Kampung Anak Negeri, listed in Surabaya Mayor Regulation Number 119 of 2021 concerning the Formation and Organizational Structure of the Technical Implementation Unit for the Kampung Anak Negeri Service at the Surabaya City Social Service. The aim of the study was to analyze and find out the supporting and inhibiting factors for the performance of social service delivery institutions in fostering abandoned mentally retarded children at UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya City. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Theory uses guidelines in compiling performance reports, State Administration Institutions (LAN, 2018). The results of the research show that the (input) is adequate in terms of human resource needs, sources of budget allocations and policies or Standard Operating Procedures, but in ideal ratio, comparisons do not yet have a reference. (output) is already visible in the provision of skills. (outcome) has fulfilled physical and non-physical needs, but education has not been given and there is an increase in potential with the work of neglected mentally retarded children. (benefits) realizing independence in daily activities and long-term benefits, that is, if a mentally retarded child still has a family, they will be sent home. (positive impact) can be seen that there is an increase in enthusiasm for learning for neglected children with mental retardation, while the negative impact is that there are abandoned children with mental retardation who do not want to be reunified with their family.*

**Keywords:** Institutional Performance, Social Services, Abandoned Children with Disabilities.

### I. Pendahuluan

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan pembangunan nasional dapat ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu upaya peningkatan kualitas padamasyarakat Indonesia secara eksklusif dengan melakukan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang memperhatikan tantangan perkembangan secara global.

Berdasarkan data berjalan pada tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik(BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21,8 juta. Kemudian, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data dari Sistem Informasi *Management* Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial (Kemensos, 2018) imana Provinsi Jawa Timur yang menduduki urutan kedua dengan jumlah penyandang disabilitas terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2018 jumlah tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Barat yakni berjumlah 27.601 orang,

disusul Provinsi Jawa Timur 22.341 orang dan di urutan ketiga terdapat pada Provinsi Jawa Tengah 17.694 orang. Sedangkan di Kota Surabaya, jumlah penyandang disabilitas menurut Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 8.671 orang. Data yang telah disajikan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami kondisi yang memprihatinkan, yaitu dari permasalahan pendidikan, lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat, serta masalah perlindungan sosial.

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) juga mengatakan bahwa 80% anak penyandang disabilitas tinggal di negara berkembang. Ada lebih dari 100 juta anak dengan penyandang disabilitas empat kali lebih mungkin menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dipertegas oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (PPPA, 2017)

Anak dengan status terlantar dan anak penyandang disabilitas memiliki hambatan yang cenderung serupa dalam proses tumbuh kembangnya. Anak terlantar cenderung terabaikan hak-hak dasarnya karena tidak ada keluarga yang menjamin akan tumbuh kembangnya. Sedangkan anak penyandang disabilitas memiliki permasalahan dalam proses tumbuh kembang karena gangguan atau hambatan yang dimilikinya (Mahdalela, 2013) Untuk itu, anak dengan disabilitas memerlukan peran keluarga yang lebih khusus dibandingkan anak-anak normal lainnya. Penyandang disabilitas mental salah satunya yaitu anak penyandang tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah dari individu yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental, yang ditandai dengan keterbatasan intelegasi serta tidak memiliki kecakapan dalam berinteraksi sosial (Smart, 2010).

Klasifikasi anak penyandang tunagrahita menurut *American Association of Mental Deficiency* (AAMD) dalam (Apriyanto, 2012) dibagi menjadi 4 jenis yaitu : Tunagrahita Ringan (*Mild Mental Retardation*) yang memiliki IQ 70-55, Tunagrahita Sedang (*Moderate Mental Retardation*) yang memiliki IQ 55-40, Tunagrahita Berat (*Severe Mental Retardation*), dan Sangat Berat (*Profound Mental Retardation*) yang memiliki IQ 25 kebawah. Sedangkan klasifikasi anak penyandang tunagrahita di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 yaitu: Tunagrahita Ringan dengan individu yang memiliki IQ 50-70, lalu pada Tunagrahita Sedang memiliki IQ 30-50 serta Tunagrahita Sangat Berat memiliki IQ kurang dari 30. Sehingga pada klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak penyandang tunagrahita hanya memiliki IQ 70 kebawah dari IQ 80-90 anak normal. Kondisi anak penyandang tunagrahita tersebut membuat kesulitan dalam berfikir, mengurus dirinya sendiri, serta mereka lebih banyak menggantungkan diri kepada bantuan orang lain.

Kondisi diatas Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan inovasi sehubungan dengan pelayanan sosial bagi anak penyandang tunagrahita terlantar. Secara khusus Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial, membentuk UPTD bernama Kampung Anak Negeri. UPTD Kampung Anak Negeri. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. (Nasional et al., 2018) Tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut, untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar. Di tempat itu, para anak penyandang tunagrahita terlantar diberikan pendampingan dan pembinaan secara komprehensif.

Anak penyandang tunagrahita terlantar yang dimaksud ialah mereka yang ditemukan oleh Satpol PP di jalanan menjadi pengemis, dan pengamen. Kadang kala, mereka hanya ditemani sesama para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Anak penyandang tunagrahita yang terlantar di jalanan, dapat disebabkan oleh keluarga yang sudah tidak ada atau meninggal semua. Dapat juga, karena ditinggalkan oleh keluarga yang berasal dari ekonomi lemah. Ada pula yang terlantar karena hilang dari pengawasan keluarga. Anak penyandang tunagrahita tersebut jalan sendirian hingga jauh dari jangkauan keluarga, kemudian menghilang. Adanya tempat perawatan khusus bagi anak penyandang tunagrahita terlantar ini tujuannya untuk membantu mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.

Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya memberikan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak penyandang tunagrahita terlantar. Pelaksanaan pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri yang ada di wilayah Kalijudan tidak begitu saja dilakukan, namun melalui tahapan. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak UPTD adalah melakukan identifikasi, penelaahan dan pengungkapan permasalahan yang dihadapi oleh anak penyandang tunagrahita terlantar. Kemudian tahap penerimaan anak penyandang tunagrahita terlantar melalui registrasi, pengasramaan dan penempatan kedalam kegiatan pembinaan.

Selain mendapatkan pembinaan, anak penyandang tunagrahita terlantar juga mendapatkan fasilitas kebutuhan jasmani (sandang, pangan dan papan), pemenuhan kebutuhan spiritual (dukungan sosial, psikologis dan pendidikan) dan pelayanan kesehatan. Tahapan yang selanjutnya adalah bimbingan sosial dan keterampilan, seperti bimbingan fisik, mental/budi pekerti, sosial dan keterampilan. Tahapan pembinaan tersebut juga terdapat pada kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, yakni penelitian yang diteliti oleh (Riyanto, 2018) mengenai kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liponsos Keputih Surabaya dalam pelayanan sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis. Pada penelitian tersebut terdapat tahap pembinaan yang terdiri dari bimbingan mental, bimbingan jasmani, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.

Proses pembinaan anak-anak penyandang tunagrahita terlantar ini masih mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nanik selaku Kepala UPTD Kampung Anak Negeri seperti berikut ini : “Ada dua orang pendamping, mendampingi sekitar 36 anak penyandang disabilitas itu yang membuat *agak kuwalahan*”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2021). Penjelasan Ibu Nanik tersebut diketahui bahwa di UPTD Kampung Anak Negeri wilayah Kalijudan masih terdapat hambatan dalam mendampingi anak-anak penyandang tunagrahita terlantar. Seperti kurangnya jumlah pendamping bagi anak-anak penyandang tunagrahita terlantar.

Pengungkapan permasalahan diatas, didukung oleh data yang menunjukkan bahwa jumlah pendamping untuk anak penyandang disabilitas terlantar hanya berjumlah 9 orang. Sedangkan, jumlah keseluruhan anak penyandang tunagrahita terlantar per tanggal 10 November 2021 berjumlah 55 anak. Tugas pendamping dibagi menjadi dua bagian *shift* yakni *shift* pagi dan malam untuk mendampingi, mengawasi dan membina anak penyandang tunagrahita terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri wilayah Kalijudan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia untuk para pendamping memang masih kurang dan kesulitan dalam mendampingi, mengawasi dan membina anak penyandang tunagrahita terlantar.

Selain mengalami hambatan dalam mendampingi, mengawasi dan membina anak penyandang tunagrahita terlantar, permasalahan selanjutnya berdasarkan observasi awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwasannya terdapat anak penyandang tunagrahita yang telah dewasa tidak diberikan bimbingan lanjutan dan untuk fasilitas pendidikan secara formal untuk anak penyandang tunagrahita tidak dilanjutkan. Hal tersebut di dukung adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arief Adhityanto Prakoso pada tahun 2018 yang berjudul “Pemberdayaan Tunagrahita dalam Perspektif Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan (UPTD Ponsos Kalijudan) Dinas Sosial Kota Surabaya” menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan menemui beberapa masalah. Masalah dalam pemberdayaan anak tunagrahita dalam pengembangan potensi diri diantaranya sulitnya komunikasi antara instruktur dan anak tunagrahita, perubahan emosi dari anak tunagrahita yang tidak stabil, belum adanya program tingkat lanjut khususnya bagi anak tunagrahita yang telah dewasa dan yang terakhir kurangnya perhatian UPTD pada pendidikan formal dan cenderung pada pendidikan informal (Prakoso, 2018).

Maka dengan ini, tuntutan kinerja UPTD perlu ditinjau untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program atau kebijakan serta visi dan misi dalam menangani permasalahan anak penyandang tunagrahita terlantar. Penelitian ini menggunakan indikator kinerja suatu organisasi publik agar dapat dilihat sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada visi dan misi. Maka dari itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi terhadap proses kerja yang dilakukan suatu organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

## II. Landasan Teori

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI, merumuskan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dari suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep yang di kemukakan oleh LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang ingin dicapai.

Menurut (Mulyadi, 2007) kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, menurut Sobandi, kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact* (Sobandi, 2006).

Menurut Moenir definisi dari konsep pelayanan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik melalui aktivitas individu maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain (Moenir, 2006). Aktivitas disini dapat diartikan sebagai suatu proses penggunaan akal, pikiran, anggota badan, dan panca indera yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang atau jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang dinamakan pelayanan. Proses yang dimaksud dalam pengertian pelayanan adalah pengertian proses yang terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut (Thoha, 2010) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: (1) pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; (2) pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini menentukan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2018) dengan fokus penelitian yaitu : Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*). Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di UPTD Kampung Anak Negeri yang ada di wilayah Kalijudan Kota Surabaya. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena merupakan tempat pembinaan bagi anak-anak penyandang tunagrahita yang terlantar dan terdapat beberapa permasalahan pada peningkatan program pelayanan sosial yang diberikan kepada anak-anak penyandang tunagrahita terlantar. Sehingga atas dasar pertimbangan, maka penulis ingin menggali informasi mengenai kinerja organisasi di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.

Berdasarkan permasalahan, justifikasi dari lokasi penelitian ini adalah tidak berjalannya program bimbingan lanjutan untuk anak penyandang tunagrahita terlantar yang telah dewasa. Jika dibandingkan dengan UPT Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) yang ada di Kota Malang, terdapat pelatihan lebih lanjut, sehingga calon lulusan dari Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat (Sukmana, 2020). Teknik analisis data menggunakan 4 (empat) alur yaitu : Pengumpulan data, Penyajian data, Kondensasi, data dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2014). Instrumen penelitian melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara kepada informan dengan menggunakan *interview guide*.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Menganalisis temuan di lapangan yang berkaitan dengan kinerja lembaga penyelenggara pelayanan sosial dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Untuk melihat kinerja lembaga, penulis menggunakan 5 (lima) indikator menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2018) yaitu Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*) :

#### 1. Masukan (*Input*)

Indikator masukan (*input*) merupakan suatu tahapan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian agar pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berlangsung dan dapat pula menghasilkan keluaran (*output*) yang baik. Indikator masukan (*input*) kinerja dapat diukur berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas dan kualitas, sumber kebutuhan alokasi anggaran dana serta meninjau kembali mengenai acuan regulasi atau kebijakan dalam menjalankan program. Dalam indikator masukan (*input*) ini mempunyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, yaitu :

##### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak dalam suatu organisasi. Penyediaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan program pada sebuah organisasi. Dalam hal ini UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya di wilayah Kalijudan jika dilihat dari

kebutuhan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Penjabaran dari sub indikator yaitu tentang Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas telah memadai, lalu secara kualitas dalam hal kecepatan telah dilakukan pada kegiatan awal penerimaan anak penyandang tunagrahita terlantar dan dalam hal ketanggapan juga sudah terlihat pada segi kesehatan. Kemudian adanya pelatihan bagi para pendamping sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan. Meskipun belum memiliki acuan pada penentuan rasio secara ideal dalam mendampingi dan membina anak penyandang tunagrahita terlantar. Namun, pihak UPTD Kampung Anak Negeri dapat dikatakan telah bisa memberikan pelayanan pada anak penyandang tunagrahita terlantar.

**b. Sumber Alokasi Anggaran Dana**

Anggaran dana merupakan rencana berkaitan dengan dana yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Anggaran berupa sejumlah uang yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dana juga merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan suatu program, tanpa adanya anggaran dana, suatu kegiatan atau program tidak dapat berjalan dengan optimal dan akan menjadi penghambat didalam pelaksanaan suatu program. Adapun sumber kebutuhan alokasi anggaran dana di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya melalui Bidang Rehabilitasi Sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya.

Penjabaran dari sub indikator yaitu tentang sumber alokasi anggaran dana, adanya sumber alokasi anggaran dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya di Bidang Rehabilitasi Sosial ini belum dapat dipaparkan secara jelas nominal alokasi anggaran dana. Namun dari anggaran dana tersebut telah dapat mencukupi kebutuhan dari anak penyandang tunagrahita terlantar, serta adanya bantuan sosial dari instansi lain, sehingga menambah pemasukan anggaran bagi UPTD Kampung Anak Negeri.

**c. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu program, kepemimpinan dan cara bertindak. Kemudian Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan dan menertibkan suatu pekerjaan. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam pelaksanaan suatu program. Penjabaran dari sub indikator yaitu tentang kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya acuan kebijakan dalam pelaksanaan program pelayanan sosial dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai alur mekanisme berjalannya pelayanan, maka pelayanan dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

**2. Keluaran (*Output*)**

Indikator keluaran (*output*) ini merupakan hal yang penting dalam suatu kemajuan organisasi. Keluaran (*output*) dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditujukan langsung untuk seluruh pencapaian dari suatu kegiatan, baik yang bentuknya berwujud maupun tidak berwujud. Keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh UPTD Kampung Anak Negeri dalam pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar berupa jasa atau pelayanan. Dalam indikator keluaran (*output*) ini mempunyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis



dalam penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yaitu :

**a. Pencapaian Sasaran**

Target pencapaian sasaran pelayanan sosial dalam pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar ini sebenarnya diberikan untuk semua anak penyandang tunagrahita terlantar yang ada di asrama. Namun, dapat dilihat pada keterbatasan yang dimiliki anak penyandang tunagrahita terlantar, apakah mereka termasuk ringan, sedang atau berat. Apabila kategorinya termasuk anak tunagrahitaringan, maka mereka masih bisa mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri. Penjabaran dari sub indikator pencapaian sasaran yaitu tentang bagaimana pencapaian sasaran dalam menghasilkan *output* pada pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar, dengan sub indikator tersebut dapat terlihat bahwasannya hanya beberapa anak penyandang tunagrahita terlantar saja yang berkategori ringan mampu mengikuti kegiatan keterampilan yang diberikan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor keterbatasan yang dimiliki pada diri anak penyandang tunagrahita terlantar. Namun pendamping mengupayakan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan kegiatan yang membantu merangsang respon dari anak penyandang tunagrahita terlantar berkategori sedang dan berat. Sehingga dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang mendukung kemajuan UPTD Kampung Anak Negeri.

**3. Hasil (*Outcome*)**

Indikator hasil (*outcome*) dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadicerminan dari berjalannya dan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan untuk jangka menengah (efek langsung). Melalui indikator hasil (*outcome*) organisasi maka akan diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran dapat memberikan kegunaan atau dampak positif yang besar. Indikator hasil (*outcome*) dalam penelitian ini dilihat guna memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, yaitu :

**a. Hasil Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar**

Hasil kinerja dalam pemenuhan kebutuhan ini penulis melihat dalam segi fisik (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan non fisik (dukungan sosial, psikologis dan pendidikan). Apabila dilihat dalam kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan, pihak UPTD telah memberikan fasilitas yang memadai, seperti memberikan pelayanan sosial kebutuhan dasar dan kegiatan bimbingan fisik. Penjabaran sub indikator yaitu tentang hasil kinerja dalam kebutuhan anak penyandang tunagrahita terlantar, adanya pemenuhan kebutuhan secara fisik dan non fisik bagi anak penyandang tunagrahita terlantar dapat menunjukkan bahwa pelayanan dari indikator hasil kinerja telah dapat memenuhi kebutuhan anak penyandang tunagrahita dari segi sandang, pangan, papan, dukungan sosial dan psikologis. Namun pada segi pendidikan secara formal memang tidak diberikan, karena faktor anggaran dan keterbatasan yang dimiliki anak penyandang tunagrahita terlantar.

**b. Hasil Kinerja dalam Peningkatan Potensi Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar**

Hasil kinerja dalam peningkatan potensi anak penyandang tunagrahita terlantar ini penulis melihat bahwasannya anak penyandang tunagrahita terlantar ini memang masih belum bisa dikatakan optimal, karena keterbatasan yang anak penyandang tunagrahita alami. Namun disamping keterbatasan yang dimiliki, anak penyandang tunagrahita

terlantar, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Hal initerlihat ada beberapa anak yang mendapatkan piagam penghargaan dari Walikota Surabaya karena hasil karya keterampilan. Penjabaran sub indikator yaitu tentang hasil kinerja dalam peningkatan potensi anak penyandang tunagrahita terlantar, adanya hasil karya yang di pamerkan hingga ke luar negeri dan memiliki nilai jual serta adanya beberapa anakpenyandang tunagrahita terlantar yang mendapatkan piagam penghargaan dalam kompetisi, maka hal tersebut dapat menunjukan bahwa menjadi cerminan dari berjalannya dan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan pembinaan yang bersifat keterampilan.

#### 4. Manfaat (*Benefit*)

Manfaat (*benefit*) dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitandengan tujuan akhir dari setiap pelaksanaan kegiatan, indikator manfaat ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (*outcome*). Indikator manfaat (*benefit*) tersebut dapat dilihat setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat diharapkan dapat dicapai bila indikator keluaran (*output*) dapat berfungsi secara optimal.

Pada indikator manfaat (*benefit*) ini mempunyai dua sub indikator yaitu, manfaat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penjabaran sub indikator yaitu tentang manfaat jangka menengah telah dirasakan manfaatnya bagi anak penyandang tunagrahita terlantar, dengan terwujudnya kemandirian pada diri anakpenyandang tunagrahita terlantar dalam hal kegiatan sehari-hari dan dapat mengikuti kegiatan keterampilan yang diberikan, maka kinerja dalam pemberian pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar dapat bermanfaat dalam jangka waktu menengah.

Penjabaran sub indikator yaitu tentang manfaat jangka panjang yang dirasakan bagi anak penyandang tunagrahita, dengan dapat berkumpulnya anak penyandang tunagrahita kepada pihak keluarga (bagi yang masih memiliki keluarga) maka kinerja dari pemberian pembinaan dapat bermanfaat dalam jangkawaktu panjang.

#### 5. Dampak (*Impact*)

Indikator dampak (*impact*) dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif atau dampak yang dapat memberikan gambaran mengenai efek secara langsung atau tidak langsung yang dihasilkan daritercapainya tujuan program dalam sebuah organisasi.

Pada indikator dampak (*impact*) ini mempunyai dua sub indikator yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sesuai dengan temuan di lapangan pada sub indikator yang pertama yaitu dampak positif yang ditimbulkan setelah adanya pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar yakni dengan adanya masukan dari pihak luar dalam peningkatan kinerja, dan adanya anak penyandang tunagrahita yang rasa keingintahuannya akan belajar semakin tinggi. Maka hal tersebut memberikan dampak positif pada pihak UPTD Kampung Anak Negeri, karena dengan masukan tersebut, pelayanan bagi anak penyandang tunagrahita dapat ditingkatkan.

Begitupun juga pada sub indikator yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan setelah adanya pelayanan sosial dalam pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar yakni anak penyandang tunagrahita terlantar yangmasih memiliki keluarga, namun tidak mau untuk dilakukan *reunifikasi* atau pemulangan kepada pihak keluarga. Akibatnya hal tersebut memberikan dampak negatif pada UPTD Kampung Anak Negeri.

### V. Kesimpulan dan Saran



Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya Kinerja Lembaga Penyelenggara Pelayanan Sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya Dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar, telah berjalan sesuai dengan salah satu tujuan UPTD yaitu dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan anak penyandang tunagrahita terlantar yang diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Pada masukan (input) sudah memadai dalam segi kuantitas maupun kualitas, namun pada penentuan rasio secara ideal dalam mendampingi dan membina anak penyandang tunagrahita terlantar masih belum memiliki acuan; sumber alokasi anggaran dana dari APBD Pemerintah Kota Surabaya; dan kebijakan mengacu pada Perwali Kota Surabaya No. 119 Tahun 2021 serta peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah lengkap. keluaran (output) sudah terlihat dari pemberian kegiatan keterampilan salah satunya adalah membatik pada anak penyandang tunagrahita terlantar yang berkategori ringan, namun pada anak penyandang tunagrahita terlantar yang berkategori sedang dan berat tidak mendapatkan kegiatan keterampilan, hal ini disebabkan keterbatasan kondisi yang dialami.

Hasil (outcome) terlihat bahwasannya sudah dipenuhi dalam hal pemenuhan kebutuhan secara fisik (sandang pangan dan papan). Namun pada kebutuhan non fisik dalam segi pendidikan tidak diberikan, hal tersebut terkendala pada faktor anggaran dan keterbatasan yang dimiliki anak penyandang tunagrahita terlantar. Kemudian keberhasilan dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar juga terlihat pada peningkatan potensi dengan adanya hasil karya yang dipamerkan ke luar negeri dan memiliki nilai jual, serta adanya anak penyandang tunagrahita terlantar yang mendapatkan piagam penghargaan. Manfaat (benefit) juga telah dirasakan anak penyandang tunagrahita baik manfaat dalam jangka menengah, seperti dapat mewujudkan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari dan manfaat jangka panjang yaitu jika anak penyandang tunagrahita masih memiliki keluarga akan dipulangkan. Dampak (impact) dalam hal positif dapat dilihat bahwa adanya masukan dari pihak luar mengenai kinerja UPTD Kampung Anak Negeri dan adanya peningkatan semangat belajar bagi anak penyandang tunagrahita terlantar, sedangkan dampak negatif yakni anak penyandang tunagrahita terlantar yang masih memiliki keluarga tidak mau dilakukan reunifikasi kepada keluarganya.

### Saran

Bagi Dinas Sosial Kota Surabaya, perlu adanya tambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau acuan kebijakan mengenai perbandingan rasio secara ideal antara pendamping dan anak penyandang tunagrahita terlantar dalam mendampingi dan membina anak-anak penyandang tunagrahita terlantar. Bagi UPTD Kampung Anak Negeri, perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang pekerjaan untuk anak penyandang tunagrahita yang telah dewasa. Agar anak penyandang tunagrahita terlantar dapat beradaptasi dengan lingkungan luar dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya setelah mereka dewasa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, N. (2012). *Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya*. Javalitera.
- Kemensos. (2018). *Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas*.  
<https://simpd.kemensos.go.id/>
- Mahdalela. (2013). *Ananda Berkebutuhan Khusus: Penanganan Prilaku Sepanjang Rentang Perkembangan*. Graha Ilmu.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara.

- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Nasional, P., Penyusunan, C., Penyusunan, T. C., Pelaksanaan, E., Pembangunan, R., & Pemerintah, R. K. (2018). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 2017, 1–17.
- PPPA, P. (2017). Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas*, 12(1), 145.
- Prakoso, A. A. (2018). *KEBUTUHAN DASAR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN ( UPTD PONSOS KALIJUDAN ) DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA*. 035, 1–10.
- Riyanto, D. A. (2018). *Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liponsos Keputih Surabaya dalam Pelayanan Sosial Dasar*. 5, 1–11.  
[http://repository.unair.ac.id/74646/3/JURNAL\\_Fis.AN.63\\_18\\_Riy\\_k.pdf](http://repository.unair.ac.id/74646/3/JURNAL_Fis.AN.63_18_Riy_k.pdf)
- Smart, A. (2010). *Anak Cacat Bukan Kiamat “Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus.”* Katahati.
- Sobandi, B. (2006). *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, O. (2020). PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur). *Sosio Konsepsia*, 9(2), 132–146. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1799>
- Thoha, M. (2010). *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Gava Media.